

# **PENGARUH KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET DAERAH**

## ***(Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon )***

Oleh :  
Janet T. Latuharhary<sup>1</sup>, Michael S. Mantiri<sup>2</sup>, Stefanus Sampe<sup>3</sup>.

### **ABSTRAK**

Aset Daerah merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah telah menertibkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Adapun tugas dan fungsi bidang pengelolaan aset daerah melakukan perencanaan, penyusunan program, penetapan kebijakan penatausahaan barang milik daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah. Namun mengkaji kualitas aparatur pemerintahnya, masih terdapat permasalahan yang kemudian menghambat efektivitas pengelolaan aset daerah antara lain ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang daerah atau aset itu sendiri. Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai atau dikelolanya dan di sisi lain pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset dimasa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan aset secara teratur dan identifikasi aset dalam hal pengadaan, penggunaan, penilaian, dan pemanfaatan sehingga efektivitas pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah. Sehingga landasan teori yang digunakan adalah Teori Spencer dan Wibowo (dalam Sudaryo 2018 : 325) untuk variabel Kompetensi dan Teori Tangkilisan (dalam Steers Richard 2013 : 140-141) untuk variabel Efektivitas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 50 orang. Persamaan regresi antara Kompetensi (X) dan Efektivitas (Y) dirumuskan sebagai  $Y=a+bX$  yang dianalisis menggunakan program SPSS versi 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi kedua variabel adalah  $Y=21,280 + 0,399X$ , dan hasil analisis data serta pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh dari kompetensi terhadap efektivitas dengan besar pengaruh sebesar 53,7% dan tingkat pengaruh sebesar 0,733. Kompetensi Aparatur Sipil Negara dinilai cukup penting dan sangat berpengaruh untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah secara signifikan.

**Kata Kunci : Pengaruh, Kompetensi, Efektivitas**

### **ABSTRACT**

*Regional Assets are Regional Property (BMD) which has an important role in improving the performance of local governments, especially in providing services to the community. For this reason, the government has curbed Government Regulation (PP) No. 27 of 2014 concerning Management of State / Regional Government Property states that management of State / Regional Government Property must be carried out based on functional principles, legal certainty, transparency, efficiency, accountability, and value certainty. The tasks and functions in the area of regional asset management carry out planning, program preparation, setting policies on the administration of regional assets, carrying out evaluations and reporting on the management of regional assets. However, examining the quality of the government apparatus, there are still problems that then hamper the effectiveness of the management of regional assets, including*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

<sup>2</sup> Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 1

<sup>3</sup> Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 2

*disorder in managing data on regional goods or the assets themselves. This makes it difficult for the Regional Government to know for certain the assets that are controlled or managed and on the other hand the local government is having difficulty developing the utilization of assets in the future. Therefore, it is necessary to have regular asset management and asset identification in terms of procurement, use, valuation, and utilization so that the effectiveness of asset management can be accounted for. This study aims to determine the effect of the competence of the State Civil Apparatus on the effectiveness of the management of regional assets. So the theoretical basis used is the Theory of Spencer and Wibowo (in Sudaryo 2018: 325) for the Competency variable and Tangkilisan Theory (in Steers Richard 2013: 140-141) for the Effectiveness variable. This research method uses a quantitative approach with a population of 50 people. The regression equation between Competency (X) and Effectiveness (Y) is formulated as  $Y = a + bX$  analyzed using the SPSS version 22.0 program. The results showed that the regression equation for the two variables was  $Y = 21,280 + 0,399X$ , and the results of data analysis and hypothesis testing showed the effect of competence on effectiveness with a large effect of 53.7% and the level of influence of 0.733. The competence of the State Civil Apparatus is considered quite important and very influential to significantly increase the effectiveness of regional asset management.*

**Keywords: Influence, Competence, Effectiveness**

## **PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masalah dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, sosial, maupun politik. Nilai Barang Milik Daerah/Aset yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah akan digunakan untuk menganalisa kondisi keuangan pemerintah. Jika Barang Milik Daerah/Aset yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi atau Barang Milik Daerah yang sudah hilang dan tidak dihapuskan namun masih tetap dilaporkan dalam laporan keuangan, maka pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut tentu tidak tepat. Berkaitan dengan Barang Milik Daerah yang sudah rusak atau hilang, salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan permasalahan tersebut adalah tindakan penghapusan Barang Milik Daerah.

Mengingat pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bagi pemerintah daerah serta besarnya pengeluaran Negara terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan pengelolaan aset/ barang milik daerah secara profesional, efektif dan mengedepankan aspek-aspek ekonomis agar pengeluaran biaya-biaya dapat tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapan, dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. Permasalahan aset menjadi permasalahan yang harus segera diatasi, dimana aset Negara maupun Daerah adalah tanggung jawab bersama pemerintah selaku pengelola dan masyarakat sebagai stakeholder.

Masalah utama pengelolaan barang daerah atau aset adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang daerah atau aset itu sendiri. Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai atau dikelolanya. Dengan demikian, aset-aset yang dikelola Pemerintah Daerah cenderung tidak optimal dengan penggunaannya, serta di sisi lain pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan aset

secara teratur dan identifikasi aset dalam hal pengadaan, penggunaan, penilaian, dan pemanfaatan sehingga efektivitas pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan dalam rangka pengamanan, barang milik negara yang dipergunakan oleh Pemerintah daerah harus dipertanggung jawabkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon. Pengelolaan aset adalah pendataan dan pelaporan inventaris yang merupakan aset daerah berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka mengamankan dan memperoleh data yang akurat mengenai aset yang dimiliki oleh Pemerintah. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan data inventaris barang daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah secara benar dan berkelanjutan melakukan administrasi pengelolaan aset dengan baik dengan harapan pengelolaan aset menjadi lebih efektif.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **• Kompetensi**

Wibowo (dalam Sudaryo 2018 : 324) mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh bercirikan profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang penting atau sebagai sebuah unggulan.

Spencer dan Wibowo (dalam Sudaryo 2018 : 325) mengemukakan lima tipe atau elemen karakteristik kompetensi, yaitu :

1. Motif (*motive*), yaitu sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memiliki perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.
2. Sifat (*trait*), yaitu karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Karakter seseorang dapat mempengaruhi prestasi di tempat kerja, seperti kemampuan mengendalikan emosi, perhatian terhadap hal yang sangat detail, dan sebagainya.
3. Konsep diri (*self-concept*), yaitu sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam berbagai situasi adalah bagian dari konsep diri orang.
4. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks, karena dapat memprediksi apa yang mampu dilakukan seseorang, bukan apa yang dilakukan. Skor pada tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan.
5. Keterampilan (*skill*), yaitu kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi atau keterampilan kognitif meliputi pemikiran analitis dan konseptual.

### **• Aparatur Sipil Negara**

Menurut Soerwono Handyaningrat (2002:11), pengertian Aparatur adalah segala aspek administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun beberapa aspek administrasi yang cukup penting adalah administrasi organisasi dan kepegawaian. Sedangkan pengertian Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### **• Efektivitas**

Tangkilisan (dalam Steers Richard 2013: 143) mengemukakan bahwa dalam pengertian efektivitas organisasi, tercakup suatu pengertian kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan, program, atau misi) suatu organisasi, produktivitas organisasi dan tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara anggota organisasi.

Adapun kriteria atau indikator dari pada efektivitas Tangkilisan (dalam Steers Richard 2013: 140-141) yakni diantaranya :

1. Pencapaian Target.

Maksud pencapaian target disini diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat teralisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Kemampuan Adaptasi (fleksibilitas).

Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan luar organisasi.

3. Kepuasan Kerja

Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Yang menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan/sistem insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi dan telah melakukan pekerjaan melebihi beban kerja yang ada.

4. Tanggung Jawab

Organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaan.

- **Pengelolaan Aset Daerah**

Aset Daerah merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono 2012 : 8)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah. Penelitian ini diawali dengan mengkaji teori-teori dan pengetahuan yang sudah ada sehingga muncul sebab permasalahan. Permasalahan tersebut diuji untuk mengetahui penerimaan dan penolakannya berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

## **HASIL PENELITIAN**

- **Regresi Linear Sederhana**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka konstannya sebesar 21,280 yang berarti jika tidak ada Kompetensi (X) maka nilai konsisten efektivitas (Y) juga sebesar 21,280. Sedangkan angka koefisien regresi sebesar 0,399 berarti bahwa setiap penambahan 1% kompetensi (X) akan meningkatkan nilai konsistensi efektivitas (Y) sebesar 0,399. Sehingga bentuk persamaan regresi sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut :

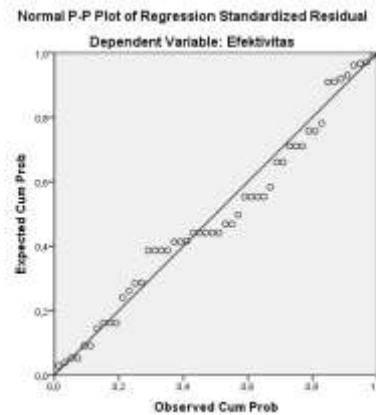
$$Y = 21,280 + 0,399X$$

- **Uji Normalitas**

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *Normal P-P Plot* untuk dapat mengetahui apakah kedua variabel (X dan Y) mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika distribusi data normal atau tidak. Jika distribusi data normal atau mendekati normal, maka

model regresinya dikatakan baik. Pengujian ini dapat dinilai dari penyebaran data. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka memenuhi persyaratan asumsi normalitas.

**Gambar 1**  
**Grafik uji normalitas**



Hasil uji normalitas berdasarkan pengolahan data SPSS 22.0 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memenuhi persyaratan asumsi normalitas.

• **Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Dasar pengambilan keputusan pengujian hipotesis penelitian ini yaitu dengan melihat nilai signifikansi (Sig), yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi lebih kecil < dari probabilitas 0,01 mengandung arti bahwa ada pengaruh Kompetensi (X) terhadap Efektivitas (Y)
- b. Jika nilai signifikansi (Sig) lebih besar > dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh Kompetensi (X) terhadap Efektivitas (Y)

Berdasarkan hasil analisis, diketahui nilai signifikansinya (Sig) sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari angka probabilitas 0,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Ini berarti “Ada pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah.”

• **Koefisien Korelasi Product Moment**

Setelah mengetahui bahwa dalam pengujian hipotesis ada pengaruh antara Kompetensi (X) terhadap efektivitas (Y), maka selanjutnya analisis untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh dari kompetensi (X) terhadap efektivitas (Y). Pengujian ini menggunakan rumus product moment yang diolah dari SPSS 22.0, dengan ketentuan pedoman penilaian sebagai berikut : (Sugiyono 2014;250)

**Tabel. 1 Pedoman penilaian product moment**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
Antara 0,800 s/d 1,00	Sangat Kuat
Antara 0,600 s/d 0,799	Kuat
Antara 0,500 s/d 0,599	Sedang
Antara 0,200 s/d 0,399	Rendah
Antara 0,000 s/d 0,199	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil analisis di atas, nilai koefisien korelasi *product moment* sebesar 0,733. Ini berarti pengaruh kompetensi terhadap efektivitas dapat dikategorikan **kuat**.

**Tabel. 2 Pearson Correlation**

Correlations		Kompetensi	Efektivitas
Kompetensi	Pearson Correlation	1	,733**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	50	50
Efektivitas	Pearson Correlation	,733**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	50	50

Dilihat berdasarkan tabel di atas nilai pearson's correlation sebesar 0,733 dengan kesimpulannya variabel x terhadap variabel y memiliki korelasi dengan derajat hubungan yaitu korelasinya kuat dan bentuk hubungannya ialah positif.

**Tabel. 3 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,733 <sup>a</sup>	,537	,527	2,852

a. Predictors: (Constant), Kompetensi

b. Dependent Variable: Efektivitas

Dari hasil *model summary* di atas yang merupakan hasil olahan SPSS 22.0, diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,537. Ini berarti bahwa pengaruh kompetensi (X) terhadap efektivitas (Y) adalah sebesar 53,7%

## PEMBAHASAN

Uji Reabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* dari tiap-tiap konstruk atau variabel lebih besar dari 0,60 yang berarti bahwa kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel tersebut adalah reliabel atau handal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebagai berikut : Variabel Kompetensi (X) nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,923 dan variabel Efektivitas (Y) sebesar 0,810.

Uji validitas menunjukkan bahwa r hitung dari masing-masing variabel lebih besar dari r tabel sebesar 0,361 dan tingkat signifikansi dari masing-masing variabel kurang dari 0,01. Dengan hasil pengujian telah dilakukan sebagai berikut:

### 1) Untuk Variabel Kompetensi (X)

Indikator dengan kode item 1 r hitungnya sebesar 0,884 0, item 2 sebesar 0.787, item 3 sebesar 0.400, item 4 sebesar 0.423, item 5 sebesar 0.769, item 6 sebesar 0.787, Item 7 sebesar 0.884, Item 8 sebesar 0.791, Item 9 sebesar 0.728, Item 10 sebesar 0.443, Item 11 sebesar 0.685, Item 12 sebesar 0.919, Item 13 sebesar 0.884, Item 14 sebesar 0.735.

### 2) Untuk Variabel Efektivitas (Y)

Indikator dengan kode item 15 r hitungnya sebesar 0.573, Item 16 sebesar 0.620, Item 17 sebesar 0.535, Item 18 sebesar 0.629, Item 19 sebesar 0.576, Item 20 sebesar 0.629, Item 21

sebesar 0.817, Item 22 sebesar 0.506, Item 23 sebesar 0.723, Item 24 sebesar 0.527, Item 25 sebesar 0.389

Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan adalah valid.

Berdasarkan dari hasil analisis data dan observasi yang telah dilakukan, dapat diungkapkan pembahasan penelitian Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Kota Tomohon, sebagai yaitu dari persepsi para responden yang diperoleh melalui hasil angket, menunjukkan bahwa kompetensi aparatur terhadap pengelolaan aset daerah pada kategori baik. Dari rumusan masalah yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, bahwa dari hasil uji hipotesis dengan melakukan uji-t, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah Kota Tomohon. Hal ini dapat terlihat pada uji-t diperoleh t-hitung sebesar 7,461 dengan tingkat probabilitas (sig) adalah 0,000, berarti t-hitung > t-tabel dan sig < 0,01 ( $7,461 > 2,682$  dan  $0,000 < 0,01$ ) hal ini berarti hipotesis yang diajukan oleh penulis diterima yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Kompetensi Aparatur Sipil Negara (X) terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Kota Tomohon (Y).

Dalam penelitian ini, didapati ada pengaruh dari Kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah di Kota Tomohon. Besar pengaruh berkisar 53,7% dimana tingkatan pengaruhnya sebesar 0,733 sehingga dapat dikategorikan mempunyai pengaruh yang **kuat**. Keberadaan kompetensi dinilai cukup penting untuk bisa meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah, sehingga dapat dikatakan jika kompetensi aparatur tinggi, maka efektivitas pengelolaan aset daerah pun meningkat, sebaliknya jika kompetensi aparatur mereka rendah, maka efektivitas pengelolaan aset mereka pun ikut menurun.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh atau tidak antara kompetensi aparatur sipil negara terhadap pengelolaan aset daerah.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Kota Tomohon mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh semua pegawai aset maka semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan aset daerah Kota Tomohon. Pengaruh kompetensi aparatur sipil negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah, hal ini dibuktikan dari hasil uji-t diperoleh bahwa t-hitung 7,461 lebih besar dari t-tabel 2,0106 pada taraf signifikan 0,000. Ini berarti bahwa variabel independen kompetensi aparatur sipil negara dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah Kota Tomohon.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ghozali. I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- Handyaningrat. S. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Haji Masagung
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Sudaryo. Y. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Afabeta. 2013
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dana R&D*. Bandung : Afabeta
- Steers M. Richard 2013. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga

## **Sumber Lainnya :**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daera

